|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Harian | : | Metro Sulawesi | Kasubaud  Sulteng I |
| Hari, tanggal | : | Minggu, 1 Februari 2015 |
| Keterangan | : | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah mengalokasikan anggaran  Rp 100 miliar lebih dalam APBD 2015 untuk sektor pendidikan. |
| Entitas | : | Propinsi |

**Palu, Metrosulawesi.com -**Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah mengalokasikan anggaran  Rp 100 miliar lebih dalam APBD 2015 untuk sektor pendidikan.

Anggota Komisi IV DPRD Sulteng Mustar Labolo mengatakan, dari Rp 100 miliar tersebut, didominasi untuk pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan yakni sebesar Rp 92 miliar.

“Dinas Pendidikan Sulteng mendapatkan alokasi dana sekitar Rp92 miliar, khusus digunakan untuk infrastruktur pendidikan,”ungkap Mustar Labolo kepada Metrosulawesi, akhir pekan lalu.

Dia meminta Dinas Pendidikan mampu mengelola dana tersebut sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan. Selain itu, kata Mustar harus mampu meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan.

Menurutnya, selain sarana pendidikan, sumber daya manusia tenaga pendidik juga harus diperhatikan.

“Sarana dan prasarana pendidikan hal penting. Namun yang utama yaitu meningkatkan mutu pendidikan,” tegasnya.

Mustar berharap anggaran yang cukup besar itu harus dimanfaatkan dengan baik. Pengawasan perlu secara ketat dalam proses pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.

Jika ada pekerjaan tidak selesai sampai batas waktu segera putuskan kontrak. Tujuannya, kata dia agar kualitas bangunan milik pemerintah mempunyai kualitas baik.

Anggota Komisi IV DPRD Sulteng Rusham meminta Dinas Pendidikan Sulteng memperhatikan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di wilayah terpencil.

Saat ini masih banyak wilayah di Sulteng belum mendapatkan sarana dan prasarana pendidikan yang layak serta tenaga pendidik yang memadai.

“Seperti tempat belajar mengajar, buku dan tenaga pendidik,”kata anggota DPRD Sulteng yang terpilih melalui daerah pemilihan Parigi Moutong itu.

Dia mencontohkan, wilayah pulau terpencil dan desa yang terisolir. Menurutnya, perlu perhatian pemerintah dalam memberikan pelayanan di bidang pendidikan di daerah terpencil tersebut.